

PRESIDENSIAL YANG KOMPROMISTIS (STUDI PRESIDENSIALISME REDUKTIF PADA MASA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO)

Oleh:
Mochamat Nurdin
STISIP Muhammadiyah Sinjai

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang sistem pemerintahan presidensial yang kompromistis di Indonesia. Sistem pemerintahan yang menganut sistem Presidensial tidak *compitable* dengan sistem partai yang multi partai. Tulisan ini menyorot dari perjalanan pemerintahan yang kompromistis antara presiden dengan parlemen. Tulisan ini menyorot masa bakti presiden SBY-Boediono 2009-2014 melalui *tracking* media.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan fokus kajian pada studi tentang sistem presidensial reduktif yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden SBY dalam meluncurkan atau melanggengkan pemerintahan haruslah dapat membangun koalisi dan kompromi antara partai politik yang ada didalam parlemen. Kompromi ini terlihat dari jumlah menteri di kabinet yang berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Kerjasama dan kompromi yang terbangun tidak hanya ada di pemerintahan, namun kompromi tersebut terjalin juga di parlemen. Kompromi yang terbangun di parlemen dan pemerintahan ini disebabkan tidak adanya partai politik pemenang pemilu secara tunggal, sehingga tidak adanya *mayor party* di parlemen.

Kata Kunci: Presidensialisme; Kompromi; Pemerintahan SBY-Boediono

PENDAHULUAN

Studi ini akan membahas tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia yang berupa presidensial dan pola kerjasamanya dengan parlemen. Dalam studi ini posisi presiden sangatlah kuat namun dalam konstitusi kita keputusan strategis haruslah tetap mendapatkan persetujuan DPR. Maka oleh sebab itu kerjasama yang harus dibangun oleh presiden guna mendapatkan dukungan dari parlemen sangatlah dibutuhkan. Setiap presiden yang terpilih dalam proses pemilu di negeri ini mengharuskan membangun koalisi dengan partai-partai yang ada diparlemen. Karena tidak adanya mayoritas tunggal partai pemenang dalam setiap pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Ini disebabkan oleh konstruk sistem kepartaian kita yang masih menganut sistem multipartai. Karena tidak adanya *mayor party* dalam parlemen maka ini akan membuka peluang bagi munculnya nilai-nilai kompromi didalam parlemen (Safa'at, 2011: 59).

Munculnya kompromi presiden pada partai-partai yang ada di parlemen inilah yang akan menyebabkan hadirnya permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana membangun kerjasama yang tidak solid dalam hubungan antara pemerintah dengan parlemen. Ini dikarenakan tidak adanya mayoritas tunggal partai pemenang dalam parlemen. Sehingga membangun koalisi dengan partai-partai yang memiliki kepentingan yang sama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik sangat tidak bisa dihindari. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa pemerintahan yang bersifat kompromistis ini adalah karena sistem kepartaian kita yang menggunakan sistem multipartai ekstrem.

Sistem kepartaian yang multipartai inilah yang tidak kompitabel dengan sistem presidensialisme sebagai mana yang disampaikan oleh Scott Mainwaring (1994) dalam studinya di 31 negara demokrasi bahwa negara yang kuat dan stabil dalam menggunakan sistem presidensialisme dengan kombinasi dwipartai cenderung lebih stabil dalam demokrasi. Sedangkan sistem presidensialisme yang dikombinasikan dengan sistem multipartai

kecenderungannya kurang stabil dalam sistem demokrasi dinegara tersebut.

Untuk memahami kombinasi antara presidensialisme dengan mutlipartai saya akan menggunakan unit analisis pada masa pemerinthan SBY-Boediono masa bakti 2009-2014. Dengan melihat pola kerjasama antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disini saya ingin melihat pola kerjasama koalisi yang terbangun dalam pemerintahan SBY-Boediono baik yang terbangun pada pemerintahan maupun yang ada di parlemen.

MEMAHAMI TIPOLOGI PRESIDENSIALISME

Pembahasan secara teoritis yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah mengenai tipologi presidensialisme. Dimana tipologi presidensialisme ini dibagi dalam empat tipologi yaitu; presidensialisme efektif, presidensialisme akomodatif, presidensialisme konfrontatif, dan presidensialisme reduktif. Dari keempat tipologi tersebut saya hanya akan membahas mengenai presidensialisme reduktif dimana dalam hal ini untuk menjelaskan mengenai hubungan lembaga kepresidenan dengan parlemen pada masa pemerintahan SBY-Boediono. Namun sebelumnya alangkah baiknya saya akan menjelaskan mengenai masing-masing tipologi tersebut.

Tipologi Presidensialisme

Berdasarkan tingkat efektifitasnya, ada empat tipologi institusionalisasi sistem presidensial (presidensialisme). *Pertama*, presidensialisme efektif yaitu desain institusi politik dan bangunan sistemnya (struktur konstitusi dan struktur politik) kokoh, personalitas dan gaya kepemimpinan presiden juga kuat (*hard presidensialism-strong president*). *Kedua*, presidensialisme akomodatif yaitu desain institusi politik dan bangunan sistemnya kokoh, namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden lemah (*hard presidensialism-weak president*). *Ketiga*, presidensialisme konfrontatif yaitu desain institusi

politik dan bangunan sistemnya rapuh, namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden kuat (*soft presidentialism-strong president*). Keempat, presidensialisme reduktif (setengah hati), yaitu desain institusi politik dan bangunan sistemnya rapuh dan

personalitas dan gaya kepemimpinan presiden juga lemah (*soft presidentialism-weak president*). Sebagaimana yang digambarkan dalam kolom berikut ini dengan kombinasinya:

Tipologi	Personalitas kepemimpinan presiden	Struktur konstitusi dan desain institusi	Struktur kepartaian di parlemen	Ideologi partai	Kontrol parlemen	Karakter koalisi
Presdiensialisme Efektif (Hard System-Strong President)	Kuat	Kokoh	Multipartai sederhana atau dua partai	Kuat	Efektif (Checks and Balances)	Solid
Presdiensialisme Akomodatif (Hard System-Weak President)	Lemah	Kokoh	Multipartai sederhana atau dua partai	Kuat	Efektif (Checks and Balances)	Solid
Presdiensialisme Konfrontatif (Soft System-Strong President)	Kuat	Rapuh	Multipartai tidak sederhana (ekstrem)	Lemah	Over (legislative heavy)	Cair
Presdiensialisme Reduktif (Soft System-Weak President)	Rapuh	Rapuh	Multipartai tidak sederhana (ekstrem)	Lemah	Over (legislative heavy)	Cair

Sumber: Yuda (2010: 62)

Presidensialisme efektif (*hard presidentialism-strong president*), yaitu apabila prinsip-prinsip sistem presidensial bersinergi dengan sistem kepartaian, ditopang personalitas dan gaya kepemimpinan yang kuat. Selain ditopang personalitas kepemimpinan presiden yang kuat, struktur konstitusi dan desain institusi politik juga kuat dan tertata sesuai prinsip presidensialisme. Sementara struktur kepartaian juga kondusif, yaitu sistem dua partai atau multipartai sederhana. Kontrol parlemen juga berjalan proposional sesuai konstitusi. Jika memunculkan koalisi partai di parlemen (multipartai sederhana bukan dwipartai), ikatan koalisi yang terbangun akan solid karena ideologi partai-partai juga kuat. Pada situasi politik seperti ini, dinamika pemerintahan mengarah pada menguatnya pelembagaan sistem presidensial dan pemerintahan berjalan dengan efektif dan juga disertai dengan *checks and balances* antara presiden dan parlemen.

Karakter dalam presidensialisme akomodatif (*hard presidentialism-weak president*) secara umum desain institusi politik dan bangunan struktur sistemnya sudah memenuhi karakteristik ideal, tetapi personalitas dan gaya kepemimpinan presiden sangat lemah dan belum memenuhi karakteristik presidensialisme secara umum. Konstruksi konstitusi dan desain institusi politik sudah kokoh, namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden cenderung lemah. Jadai, walaupun personalitas presiden lemah, struktur konstitusi dan desain institusi sudah kuat. Sementara struktur kepartaian juga kompetabel dan kondusif, yaitu sistem dua partai atau multipartai sederhana. Kontrol parlemen juga berjalan proporsional sesuai konstitusi. Jika, memunculkan koalisi partai di parlemen (multipartai sederhana bukan dwipartai), ikatan koalisi yang terbangun akan solid karena ideologi partai-partai juga kuat.

Presidensialisme konfrontatif (*soft presidentialism-strong president*) terjadi apabila bangunan konstitusi dan desain institusi politik masih rapuh, serta sistem kepartaian juga kurang kondusif (multipartai ekstrem). Sementara personalitas dan gaya kepemimpinan presiden relatif kuat dan cenderung melakukan perlawanan secara konfrontatif dalam berhadapan dengan parlemen. Jadai, walaupun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden kuat, struktur konstitusi dan desain institusi politiknya masih rapuh. Struktur kepartaian juga tidak kondusif dengan sistem presidensial, yaitu sistem multipartai ekstrem. Kontrol parlemen juga sangat kuat sehingga mengganggu kinerja dan stabilitas pemerintahan. Koalisi partai di parlemen juga rapuh karena ideologi partai-partai sangat lemah dan pragmatis.

Kondisi presidensialisme menjadi presidensialisme reduktif (*soft presidentialism-weak president*) terjadi apabila desain institusi politik dan struktur konstitusi masih rapuh dan munculnya undang-undang dibawah konstitusi yang mereduksi prinsip presidensialisme dalam konstitusi. Struktur politik kepartaian juga tidak kondusif bagi presidensialisme (multipartai ekstrem dan terfragmentasi), serta perilaku aktor politik yang cenderung parlementarisme. Selain itu personalitas dan gaya kepemimpinan presiden cenderung lemah, serta struktur konstitusi dan institusi politik juga rapuh. Struktur politik kepartaian juga tidak kondusif dengan sistem presidensial, yaitu sistem partai tidak sederhana dan terfragmentasi. Kontrol parlemen sangat kuat dan posisi parlemen cenderung lebih kuat daripada presiden (*legislative heavy*). Koalisi partai yang terbangun di parlemen sangat rapuh karena ideologi partai-partai sangat lemah dan pragmatis.

Dari tulisan diatas dapat dilihat bahwa penulis lebih menfokuskan pada salah satu tipologi presidensialisme, yakni menfokuskan pada presidensialisme reduktif (*soft*

presidentialism-weak president) dimana dilihat dari rapuhnya desain konstitusi dan institusi politik serta lemahnya personalitas dan gaya kepemimpinan presiden. Dalam hal ini dapat dilihat dalam konteks pemerintahan SBY-Boediono dalam melaksanakan pemerintahan dan pola kerjasamanya dengan parlemen. Kompromi-kompromi yang timbul dari dampak presidensialisme reduktif tersebut dilihat juga dalam proses bagaimana menggolkan kebijakan pemerintah, serta bagaimana menyikapi permasalahan mega skandal bank century dan kasus-kasus lain yang akan dijadikan sebagai bahan penguat argumen.

Konsep Presidensialisme Reduktif

Presidensialisme reduktif (*soft presidentialism-weak president*) dapat terjadi apabila desain institusi politik dan struktur konstitusi masih rapuh dan munculnya undang-undang dibawah konstitusi yang mereduksi prinsip presidensialisme dalam konstitusi. Struktur politik kepartaian juga tidak kondusif bagi presidensialisme (multipartai ekstrem dan terfragmentasi), serta perilaku aktor politik yang cenderung parlementarisme. Selain itu personalitas dan gaya kepemimpinan presiden cenderung lemah, serta struktur konstitusi dan institusi politik juga rapuh. Struktur politik kepartaian juga tidak kondusif dengan sistem presidensial, yaitu sistem partai tidak sederhana dan terfragmentasi. Kontrol parlemen sangat kuat dan posisi parlemen cenderung lebih kuat daripada presiden (*legislative heavy*). Koalisi partai yang terbangun diparlemen sangat rapuh karena ideologi partai-partai sangat lemah dan pragmatis.

Struktur sistem presidensial yang diterapkan mengarah pada penurunan kualitas dan efektivitas pemerintahan. Presidensialisme reduktif terjadi apabila kompromi-kompromi politik yang muncul mengarah pada penurunan kualitas dan efektivitas presidensial, baik sistem presidensial maupun efektivitas kekuasaan presiden. Implikasinya, prinsip ideal presidensialisme mengalami reduksi. Namun dalam kondisi seperti ini komponen politik presidensial masih berjalan dan karakteristik pelembagaan presidensial masih menyertai dinamika politik presidensial tereduksi meskipun tidak secara utuh.

Presidensialisme reduktif juga ditandai dengan kuatnya intervensi parpol terhadap presiden dan tingginya akomodasi presiden terhadap kepentingan parpol dalam proses pengangkatan/pemberhentian anggota kabinet. Pola relasi antara presiden dan parpol adalah akomodatif-interventif. Kontrol parlemen terhadap pemerintah berlebihan dan perjalanan pemerintahan seringkali dibayangi dengan ancaman *impeachment* dari parlemen. Hubungan presiden dan parlemen seringkali menjadikan parlemen lebih kuat daripada presiden. Relasi antara presiden dengan parlemen yang terbayang-bayangi oleh arogansi lembaga parlemen menjadikan presiden untuk membuka celah kompromi dengan parpol. Sikap lemah dari presiden inilah yang menjadi peluang bagi parlemen untuk mendesakkan kepentingan mereka kepada pemerintah, sehingga ini dapat memunculkan sikap-sikap kompromi yang bersifat internal dan eksternal dan pola hubungan antara presiden dan parlemen.

KOMPROMI PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO

Sebagaimana pembahasan diatas, bahwa presidensialisme reduktif merupakan salah satu tipologi presidensialisme yang sangat rentan. Dari kerentanan itulah ada beberapa aspek yang mempengaruhi derajat kerjasama antara presiden dengan parlemen dilihat dari sistem multipartai yang ekstrem. Kerjasama antara presiden dan parlemen dalam konsep presidensialisme reduktif akan berimplikasi dan berpotensi pada kompromi-kompromi. Potensi Kompromi tersebut terlihat dalam kombinasi presidensialisme-multipartisme yang bersifat eksternal dan bersifat internal. Tidak terlepas pula pada pemerintahan SBY-Boediono, dimana Potensi kompromi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Potensi Kompromi Eksternal Pemerintahan SBY-Boediono

Ada beberapa potensi kompromi yang akan terjadi antara presiden dengan parlemen dalam kombinasi presidensialisme-multipartisme. *Pertama*, pembentukan Kabinet dan pola relasi presiden-partai politik, dimana intervensi partai politik terhadap presiden dalam pembentukan kabinet sangat tinggi, karena komposisi presiden tidak ditopang konstitusi dan desain institusi politik yang kuat serta tidak memiliki dukungan parlemen yang memadai. Disini terlihat pada awal-awal terpilihnya SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden keduanya bimbang dalam menentukan siapa-siapa yang akan menduduki menteri dalam kabinetnya pada KIB jilid 2. SBY sebagai presiden terkesan lamban dalam menentukan pilihan dan kebijakan, terlihat tarik ulur kepentingan para parpol pendukung SBY pada pemilu 2009 untuk menempatkan kadernya. SBY yang berkeinginan untuk mengisi jajaran kabinetnya dengan para profesional, namun tidak terlepas juga usulan dari para politisi yang telah berjasa terhadap pemenangannya. Sementara personalitas dan gaya kepemimpinan presiden SBY juga relatif terkesan lemah, sehingga presiden cenderung akomodatif terhadap partai politik dalam pembentukan kabinet. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kompromi-kompromi politik dalam pembentukan kabinet sangat besar. Partai politik intervensif, presiden akomodatif (intervensif-akomodatif) ini terlihat pada daftar menteri kabinet indonesia bersatu jilid 2 sebelum adanya reshuffle. Terlihat dari 34 menteri yang dilantik oleh SBY terdapat sebagian besar yang berasal dari partai politik (Rahman, 2010).

Kedua, konfigurasi kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah diparlemen secara kuantitas kekecilan atau secara kuantitas kebesaran, tetapi secara kualitas ikatan koalisi yang terbentuk sangat rapuh dan cair. Ini terbukti ketika menghadapi kasus megaskandal Bank Century dimana dua partai politik anggota koalisi pendukung presiden diparlemen mendukung opsi C yang mengatakan bahwa dalam pencairan dana bantuan terhadap bank century terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh menteri keuangan. Dimana dalam hal ini berlawanan dengan kehendak dari partai pengusung presiden yaitu partai demokrat yang mengatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pencairan dana bank century. Dari kekalahan itulah nampak bahwa koalisi yang dibangun oleh partai presiden tidaklah solid, Partai koalisi pemerintah ini pun semakin blak-blakan membelot koalisi

yang dipimpin oleh Partai Demokrat (Rudy, 2010). Tidak adanya disiplin partai politik dalam menaati kesepakatan koalisi antar partai pendukung presiden akan menyebabkan rapuhnya bangunan koalisi karena tidak ditopang oleh relasi ideologis yang sejalan antar partai. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan presiden juga relatif lemah dan kurang percaya diri. Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi cukup besar. Presiden sangat bergantung pada koalisi di parlemen.

Ketiga, hubungan presiden dan parlemen. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan presiden juga relatif lemah dan kurang percaya diri. Kondisi ini akan membuka potensi terjadinya kompromi-kompromi cukup besar. Presiden sangat bergantung pada koalisi di parlemen. Karena lemah dan kurang percaya dirinya itulah yang membuka peluang negosiasi ulang tentang tatanan koalisi yang sudah terbangun. Dengan kasus skandal bank century ini memaksa presiden sebagai pemimpin koalisi untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari partai-partai pembangkang seperti partai Golkar dan PKS. Salah satu bentuk akomodasi dari kepentingan tersebut adalah dengan membentuknya "Sekretariat Bersama" dimana dalam hal ini dikoordinatori oleh Aburizal Bakri dan sekaligus sebagai ketua partai Golkar. Ini jelas mengindikasikan bahwa presiden sangatlah lemah berhadapan dengan parlemen sehingga presiden cenderung kompromistik.

Keempat, aspek kompromi *impeachment* presiden. Struktur konstitusi dan desain institusi politik tidak merumuskan secara jelas mekanisme *impeachment* terhadap presiden hanya bisa dilakukan karena alasan hukum yang diputuskan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Namun kemungkinan *impeachment* secara politis tetap terbuka. Kalaupun konstitusi dan desain institusi politik merumuskan secara jelas mekanisme *impeachment* terhadap presiden hanya bisa dilakukan karena alasan hukum, namun dukungan politik presiden di parlemen masih sangat dibutuhkan guna menjaga stabilitas politik nasional. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan presiden relatif terlihat lemah dan kurang percaya diri akan membawa kekhawatiran yang berlebihan dengan ancaman *impeachment* secara politis. Ancaman dari parlemen yang untuk melanjutkan pada tahap hak menyatakan pendapat dan dapat berujung pada *impeachment* ini, tentu membuat presiden berpikir ulang untuk membuka ruang kompromi dengan partai-partai yang ada di parlemen terutama pada partai-partai koalisi. Partai Golkar dan PKS yang kelihatan genit ini mencoba memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan renegotiasi terhadap komposisi koalisi yang sudah terbangun. Bahkan tersiar kabar bahwa partai Golkar dan PKS akan dikeluarkan dari koalisi partai demokrat dalam hal ini partai pemerintah. Namun pada akhirnya Partai Demokrat tidak berani untuk melakukan pemecatan terhadap partai yang secara terang-terangan mendukung terhadap opsi C. tetapi lebih mengakomodir terhadap apa yang menjadi solusi bersama dalam pemecahan masalah di parlemen. Mengingat kalau terjadi pengurangan terhadap anggota koalisi dan tidak mampu menggantikan dengan partai lain dalam jumlah kursi di parlemen akan membawa dampak yang buruk bagi kelangsungan bargaining presiden secara politik di parlemen karena PDI-P dan Gerindra tidak bersedia bergabung dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono.

Potensi Kompromi Internal Pemerintahan SBY-Boediono

Aspek kompromi secara internal ada empat aspek; *pertama*, aspek hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet terancam mengalami reduksi akibat intervensi partai politik. Penggunaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet selalu disertai *interview* elite-elite partai politik. Dimana jatah pos-pos di kementerian tertentu diperuntukkan untuk para politisi dari partai politik pendukung presiden. Meskipun dalam KIB jilid 2 ini masih ada orang-orang lama dari KIB jilid I, namun pada KIB jilid 2 ini presiden mencoba mengadakan "*Fit and Proper Test*" guna menyaring calon menteri agar terkesan bahwa presiden kuat dan benar-benar melihat kemampuan mendasar dari para calon menteri yang akan presiden pilih. Kenyataannya personalitas dan karakter kepemimpinan presiden dalam hal ini relatif lemah dan kurang percaya diri dalam menghadapi intervensi partai politik. Terlihat bahwa presiden cenderung akomodatif dan kompromistik dalam proses pembentukan kabinet. Akibatnya hak prerogatif presiden tereduksi oleh kepentingan-kepentingan partai politik.

Kedua, aspek kompromi pada komposisi kabinet. Kecenderungan komposisi kabinet adalah kabinet koalisi partai politik (bukan zaken kabinet). Anggota kabinet berasal dari unsur partai politik lebih mendominasi kabinet, baik kuantitas maupun pengaruh. Proses pengangkatan anggota kabinet lebih dominan berdasarkan pada pertimbangan akomodasi politik ketimbang kompetensi dan profesionalitas. Hal itu karena basis partai politik presiden relatif lemah. Komposisi kabinet lebih didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang partai politik ketimbang yang berlatar belakang profesional. Ini terkadang berdampak pada kompetensi dan profesionalitas dari para menteri yang mengisi dalam kabinet. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan presiden juga relatif lemah dan kurang percaya diri dalam menghadapi intervensi partai politik, sehingga presiden cenderung akomodatif dan kompromistik dalam proses pengangkatan anggota kabinet berdasarkan pertimbangan akomodasi politik berpotensi lebih besar.

Ketiga, aspek hubungan antara presiden dan wakil presiden. Biasanya pada setiap negara yang menggunakan sistem kepartaian multipartai ekstrem proses negosiasi dari koalisi partai pendukung presiden ini menawarkan wakil presiden yang akan mendampingi presiden. Ini dikarenakan partai pengusung presiden dalam pemilu legislatif tidak mendapatkan kemenangan yang bersifat *major party* didalam parlemen. Sehingga mengharuskan calon presiden untuk negosiasi dengan partai koalisi untuk mengambil salah satu kader dari internal partai koalisi untuk dijadikan wakil presiden. Namun dalam kasus SBY-Boediono ini dimana Boediono yang diambil dari nonpartai dan lebih mewakili dari unsur profesional yang lebih dipilih SBY untuk dijadikan wakil presidennya, guna mengurangi gesekan kepentingan yang berbeda antara presiden dan wakil presiden sebagaimana yang terjadi pada masa SBY-JK. Dalam dimensi dan fokus Presidensialisme reduktif dimana konstitusi tidak mengatur secara jelas fungsi dan wewenang wakil presiden serta hubungan antara presiden dan wakil presiden dalam koridor prinsip presidensialisme, basis dukungan politik wakil presiden lebih kuat daripada presiden. Namun karena wakil presiden diambil dari

nonpartisan dan lebih cenderung mewakili para profesional, maka gesekan kepentingan antara presiden dengan wakilnya dapat dikurangi karena wakil presiden tidak berasal dari salah satu partai koalisi. Politik negosiasi lebih cenderung terjadi diparlemen ini terbukti dengan adanya skandal bank century yang di indikasikan melibatkan wakil presiden Boediono dan Manten menteri keuangan sri mulyani. Dimana dalam hal ini sri mulyanilah yang dijadikan korban daripada mengorbankan Boediono selaku wakil presiden. Pola hubungan antara presiden dan wakil presiden tidak terlalu nampak karena dengan menjadikan profesional sebagai wakil presiden ini membuat presiden lebih terkesan kuat dibandingkan dengan wakilnya. Sehingga presiden dalam mengambil keputusan cenderung memiliki keberanian untuk mengambil keputusan akhir dan

final policy berada ditangan presiden sebagai *single chief executive*.

Keempat, aspek kompromi pada loyalitas menteri. Dimana efek pengangkatan menteri atas rekomendasi partai adalah munculnya dualisme loyalitas menteri. Satu sisi loyalitas kepada presiden sebagai kepala pemerintahan (*single chief executive*), disisi lain loyalitas kepada partai politik asalnya sebagai pihak yang merekomendasikan. Menteri unsur partai politik juga memiliki rangkap jabatan di partai politiknya. Selain menjalankan platform presiden (kabinet), para menteri juga berkepentingan membesarkan partai. Ini terlihat dari komposisi menteri yang ada dikabinet dimana lebih didominasi oleh menteri yang berasal dari partai politik:

Tabel: Jumlah Menteri dari Kader Partai KIB dan KIB II.

Partai	Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)			Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II
	20 Oktober 2004	Reshuffle I	Reshuffle II	
Demokrat	2	2	2	6
Golkar	2	3	4	4
PKS	3	3	3	4
PPP	3	3	2	2
PKB	2	2	2	2
PAN	2	2	2	3
PBB	3	3	1	-
PKPI	1	1	1	-
Non partai	18	17	19	15
Total	36	36	36	36

Sumber: (suara publik, 2011)

Ini mengindikasi dari loyalitas para menteri akan terbelah dan tidak fokus pada platform presiden (kabinet). Sehingga kinerja kabinet secara keseluruhan akan terpengaruh oleh permasalahan politik yang terjadi antara presiden dan partai politik yang ada diparlemen. Dari 36 orang menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 ini sebanyak 21 orang menteri yang berasal dari partai politik. Sedangkan 15 menteri yang berasal dari nonpartai, ini terlihat akomodasi dan kompromi politik presiden dan partai politik dalam penentuan kabinet.

KESIMPULAN

Perpaduan sistem presidensial dan multipartai sangat memungkinkan presiden yang berasal partai kecil dipilih suara mayoritas. Penerapan sistem presidensial dalam suatu sistem multipartai memang cenderung melahirkan presiden minoritas (*minority president*). Presiden minoritas ini dipilih langsung oleh rakyat, tetapi tidak didukung mayoritas suara diparlemen. Presiden minoritas akan memimpin pemerintahan minoritas. Hal ini terjadi ketika presiden berasal dari partai minoritas.

Pada tradisi politik sistem dua partai, presiden cenderung berasal dari partai pemenang pemilu dan secara otomatis berasal dari partai mayoritas. Sementara pada sistem multipartai, partai pemenang mayoritas dalam pemilu cenderung tidak ada. Dalam sistem multipartai dengan tingkat heteroginitas masyarakat yang cukup tinggi, pemilih akan cenderung memberi dukungan kepada partai yang memiliki ikatan primordial dengannya. Selain itu, dalam sistem multipartai suara dalam pemilu memiliki

kecenderungan terdistribusi relatif merata dan sulit memunculkan sebuah partai pemenang yang memiliki suara mayoritas diparlemen. Presiden terpilih tidak menguasai suara mayoritas diparlemen akan menjadi presiden minoritas (*minority president*).

Implikasi selanjutnya, karena posisi presiden minoritas memerlukan dukungan dari parlemen, partai-partai besar diparlemen merasa berhak menekan presiden untuk menentukan kabinet. Hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet yang dijamin konstitusi akan digerosoti partai-partai yang mendominasi parlemen, dan kekuasaan presiden selanjutnya tereduksi. Reduksi kekuasaan preisdan ini akan terlihat pada proses pembentukan kabinet, penyusunan kabinet tidak hanya bersandar pada hak prerogatif, tetapi juga bergantung pada kompromi dan akomodasi politik. Bahkan masalah kompromi inilah yang lebih dominan mewarnai proses penyusunan kabinet. Ditambah lagi dengan personalitas dan gaya kepemimpinan SBY yang terkesan lamban, lemah dan tidak percaya diri ini akan lebih membuka peluang untuk kompromi dan akomodatif.

REFERENSI

- Lijphart, Arend, 1995; *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
Koiruddin, 2004; *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Safa'at, Muchamad Ali, 2011; *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik*

- dalam *Pergulatan Republik*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Yuda, Hanta AR, 2010; *Presidensialisme Setengah Hati dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Choel, 2010; dalam <http://www.blogg3r.co.cc/2010/10/daftar-menteri-kabinet-indonesia.html>
- Rudy, Sy, 2010; dalam http://www.priangan20.com/index.php?option=com_content&view=article&id=824:opsi-c-kalahkan-opsi-a-tim-pengawasan-segera-dibentuk&catid=49:politic&Itemid=77
- Suara publik, 2011; dalam <http://suarapublik.co.id/2011/04/06/penilaian-terhadap-menteri-dari-partai-politi>

URGENSI TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE

Oleh:

A Mulawansa Mappakalu
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Globalisasi telah memicu peningkatan kesadaran secara global di semua sektor kehidupan masyarakat dunia yang wujudnya dalam bentuk pergeseran cara berpikir dan bertindak sehingga mempengaruhi semua dinamika sektor dan perilaku kehidupan masyarakat.

Salah satu pergeseran berfikir tersebut adalah tuntutan bagaimana menyediakan pelayanan publik bermutu tinggi sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat bangsa, yang saat ini kemudian menjadi tema sentral paradigma baru dari pelayanan publik (Bijah Subijanto, 2007). Terdapat tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Pertama*, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan filiasi politik, etnis dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi. *Kedua*, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan *ketiga*, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian.

Kata kunci: Transparansi Pelayanan; Good Governance

PENDAHULUAN

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik baru saja memperoleh pengesahan di DPR pada tanggal 23 Juni 2009 setelah hampir empat tahun perjuangan yang amat melelahkan. Situasi di atas memicu gagasan perlu ada upaya mengubah cara berfikir dan bertindak dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Perlu dicari kunci yang tepat bagi aparat pemerintah RI untuk membuka pikiran dan hati agar tidak terbelenggu dengan paradigma berpikir yang kurang mendukung dalam pencapaian pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, perlu dikaji berbagai variasi model pelaksanaan pelayanan publik yang ideal, sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau pemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau pemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter atau sewenang-sewenang.

KONSEP TRANSPARANSI DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Konsep Transparansi Pelayanan Publik

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik

untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara seimbang.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting seiring dengan semakin kuatnya keinginan untuk terus mengembangkan praktik *Good Governance* yang mensyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan kata lain pemerintah pada setiap tingkatan, terutama pada level layanan yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan dituntut untuk terbuka dan menggaransi ruang yang dapat diakses oleh stakeholder's terhadap berbagai sumber informasi tentang proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dimaksud serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan tersebut.

Sejumlah point informasi mengenai tindakan pemberi layanan, misalnya : alasan yang melatarbelakangi tindakan, bentuk tindakan yang diharuskan serta waktu dan cara melakukan tindakan dimaksud-harus tersedia bagi stakeholders dan masyarakat luas.

Dengan leluasa mengakses berbagai informasi, secara tidak langsung dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk turut menilai sejauh mana keberpihakan pemerintahnya telah mengakomodir kebutuhan dasar yang selama ini menjadi harapan masyarakat.

Terhadap alokasi anggaran misalnya, masyarakat dan stakeholders berhak memperoleh informasi dari mana sumber anggaran diperoleh, berapa jumlah dana yang dialokasikan serta apakah pemerintah membelanjakan anggaran sedemikian itu untuk kepentingan masyarakat luas atukah hanya untuk sekelompok orang tertentu yang memberikan keuntungan daur ulang bagi dirinya sendiri atukah hanya untuk kepentingan oknum-oknum aparat layanan tertentu saja.

Lebih dari itu masyarakat dan stakeholders semakin perlu untuk mengetahui, apakah kebijakan yang diterapkan tersebut beserta sejumlah *resorches* yang mendukungnya, benar-benar menghasilkan kinerja yang terukur sesuai yang diharapkan atau tidak. Pengalaman adalah guru terbaik kata orang bijak karena alasan tertentu, banyak kebijakan yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan seperti yang direncanakan maupun banyak belanja yang digelontorkan tidak seperti yang diharapkan.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Karena itu, setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna. Penyelenggaraan layanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna. Penyelenggaraan layanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan diperlukannya persyaratan itu dalam proses pelayanan.

Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh warga pengguna. Para penyelenggara sering kali merasa tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna. Mereka menganggap bahwa mengetahui persyaratan pelayanan sepenuhnya menjadi urusan pengguna layanan, bukan menjadi bagian dari tanggung jawab dan peran mereka sebagai penyelenggara layanan. Kalaupun mereka menganggap perlu menjelaskan persyaratan pelayanan, mereka cukup melakukannya dengan menempel pengumuman di papan tulis yang terdapat di ruang tunggu atau disekitar tempat penyelenggaraan layanan. Bagi mereka, menempel di papan pengumuman ini dianggap sudah cukup.

Pada kenyataannya, para pengguna seringkali tidak mengetahuinya karena mereka tidak bisa membaca, memahami atau bahkan tidak melihat papan pengumuman yang ada karena diletakkan di tempat yang tidak strategis.

Karena itu, untuk hal-hal yang sangat penting seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan, para petugas pemberi layanan perlu menjelaskannya kembali, atau setidaknya mengecek kembali ketika berinteraksi dengan para pengguna.

Indikator kedua dari transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Maksud dari dipahami di sini bukan hanya dalam artitiliteral semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan.

Indikator ketiga dari transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Dengan menggunakan ketiga dimensi transparansi tersebut maka penilaian terhadap transparansi pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih lengkap. Selama ini rezim pelayanan sering mengklaim dirinya telah bertindak transparan ketika hanya menempel papan pengumuman, misalnya berisi mengenai besaran biaya dan prosedur pelayanan, di loket pelayanan. Tentu mengumumkan biaya dan prosedur pelayanan secara terbuka ditempat yang mudah diakses oleh para pengguna adalah sesuatu yang baik dan menjadi bagian dari transparan pelayanan. Namun, hal tersebut belumlah cukup.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Ratminto, Winarsih, 2005 :19). Pelayanan publik adalah segala kegiatan upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Winarsih, 2005 :18).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 18 yang berbunyi:

Masyarakat berhak:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan layanan;
- e. Memberituhkan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpanan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;

- h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman;
- i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 19

Masyarakat berkewajiban :

- a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.

Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokrasi, dan tujuannya adalah membangun *Good Governance* mulai dari akan rumput politik. Desentralisasi inilah yang menghasilkan *local government* (pemerintahan daerah) (Grosroos, 2001 : 59). Dalam konsep *Good Governance* tersebut, ada 3 aktor yang bermain, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Wibawa dan Yuyun, 2002 : 39). Pemerintah di sini berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang antara lain berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan public (Pamudji, 2000 : 23), dan menurut Zeithaml dan Berry (2001 : 67) pelayanan publik itu harus dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel agar tidak merugikan warga yang dilayani. Pelayanan publik yang transparan adalah merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance* (pemerintahan yang baik).

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Kep. Menpan RI. KEP/26/M.PAN/2/2004. Maksud ditetapkan Keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, *motto* pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat

terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung diakses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu (Hamdi, 2001 :51-52). Menurut Riswandha (2003 : 59), transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.

Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat dari masyarakat adalah merupakan kebutuhan utama agar aparat memahami aspirasi riil masyarakat. Keterbukaan sangat diperlukan untuk mengurangi peluang timbulnya perilaku aparat yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Ratminto dan Winasih (2005 : 209-216), paling tidak ada 10 (sepuluh) dimensi atau kondisi aktual yang diharapkan terjadi dalam transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

1. Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk Bagan Alir. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk *Flow Chart* (Bagan Alir) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Bagan Alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai berikut :
 - a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan.
 - b. Informasi bagi penerima pelayanan.
 - c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan.
 - d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
 - e. Pengendali (*kontrol*) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan

penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelaksanaan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan.
5. Kepastian rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
6. Kepastian dan kurung waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.
7. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan SK. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan.
8. Lokasi pelayanan harus jelas. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di kantor Kelurahan/Desa/Kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.
9. Janji pelayanan harus tertulis secara jelas. Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis

secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk didalamnya mengenai standar kualitas pelayanan. Dapat pula dibuat “Motto Pelayanan”, dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan.

10. Standar pelayanan publik harus realistis dan dipublikasikan pada masyarakat. Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.
11. Informasi pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

KONSEP KEPERCAYAAN PUBLIK

Kepercayaan adalah naluri hidup yang vital, sebab ia timbul bersama dorongan-dorongan lain sebagai perlengkapan hidup manusia umumnya. Semua itu merupakan dorongan rohaniah manusia, yang selalu mengajar mereka untuk berbuat dan menyelesaikannya. Bahkan dari dorongan-dorongan itu timbul masalah semi masalah yang tidak akan henti-hgentinya dalam hidup manusia, sehingga hidup pernah diartikan dengan menimbulkan dan menyelesaikan masalah demi masalah. Demikian pula dengan kepercayaan, yaitu sebagai salah satu tuntutan naluri manusia.

Terlaksananya pemerintahan yang baik yang berarti dapat melakukan semua tugas pokok pencapaian misi hakikinya diperlukan kepemimpinan yang efektif yang memiliki “integritas tinggi” yaitu memiliki komitmen sebagai pelayan (*servant leaders*) yang bertanggung jawab kepada masyarakat (*public accountability*). Seseorang dapat mencapai sukses, apabila ia mampu mengembangkan semangat “pelayan”. Ia akan melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya, semakin banyak yang dilayani berarti semakin ia dibutuhkan orang banyak. Semakin banyak orang yang membutuhkan, ia telah dipercaya orang banyak, itu berarti ia berpengaruh besar, ia dipilih orang

banyak. Pengaruh disini bukan berarti “menguasai” tetapi dalam arti “kemampuan” mengembangkan partisipasi orang lain. Dialah sebenarnya seorang pemimpin yang efektif dan sukses.

Seorang pemimpin dituntut kemampuan melaksanakan manajemen dalam hal ini ia dituntut memiliki “pengaruh” sehingga mampu mengembangkan partisipasi seluruh anggota organisasinya. Ini dapat ditelusuri dari inti manajemen adalah “kepemimpinan”, inti dari kepemimpinan adalah “pengambilan keputusan” inti dari pengambilan keputusan adalah “hubungan antar manusia”, sedangkan inti dari hubungan antar manusia adalah “pengaruh”.

Menurut Kepala LAN-RI (Anwar Suprijadi : 2004) pemimpin masa depan yang diharapkan adalah pemimpin yang memenuhi 4 syarat yaitu :

1. Mempunyai visi yang jelas
2. Dipercaya dan jujur
3. Berpikir sistemik
4. Komitmen pada tugas dan tanggung jawab.

Mudah dimengerti bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah haruslah sosok figur yang memiliki integritas, berkepribadian kuat dan terpercaya, dan memiliki kepekaan (sensitifitas) terhadap norma dan etika. Kesadaran akan norma dan etika itulah yang akan menjaga pemerintah tersebut dari kemungkinan terdegradasi menjadi pemerintah yang kurang atau bahkan tidak lagi dipercaya publik.

KONSEP PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNMENT*)

Dalam rangka mencapai tujuan dan aspirasi dari masyarakat, setiap negara harus memiliki *Good Government* (penyelenggaraan pemerintahan yang baik). Untuk mencapai *Good Government* tersebut harus dimulai dari terwujudnya *Good Governance* (pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab). Menurut dokumen ESCAP (9), *Good Governance* mempunyai 8 karakteristik utama : bersifat partisipatif, *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan dan membela yang lemah, efektif dan efisien, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan fokus yang sentral juga selalu disertai oleh keterbukaan (*transparency*) dan menerapkan undang-undang (*rule of law*).

Prof. Dr. Sofian Effendi, dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di Kantor Menteri Negara PAN pada tanggal 22 September 2005 di Jakarta, memaparkan sebagai berikut :

1. Dalam kamus, istilah *government* dan *governance* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara.
2. Istilah *Governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak (Woodrow Wilson) memperkenalkan bidang studi

tersebut kira-kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, baru muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan, *Good Government* dalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah *Good Governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

3. Istilah pemerintah (*Government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Sedangkan tata pemerintahan (*Governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada, yaitu pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.
4. Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (*governance*) lebih luas dibandingkan dengan pemerintah (*government*), karena unsur yang terlibat dalam tata pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk didalamnya ada unsur pemerintah (*government*).
5. Hubungan antara pemerintah (*government*) dengan tata pemerintahan (*governance*) bisa diibaratkan hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam padi maka rumput dengan sendirinya akan juga turut tumbuh. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah (*government*) yang baik, maka tata pemerintahan (*governance*) yang baik belum tentu tumbuh. Tapi jika kita menciptakan tata pemerintahan (*governance*) yang baik, maka pemerintah (*government*) yang baik juga akan terwujud.

Dalam hubungan ini Prof. Dr. Sofuan Effendi juga menuturkan bahwa perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Konsep *Good Governance* dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai pengelolaan atau kepengarahan negara yang baik.
2. Pelaksananya disebut *government*.
3. *Government* identik dengan pengelola, pengurus negara.
4. Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan secara efisien.
5. Bagaimana penyelenggaraan negara di tata dan bagaimana tatanan itu berproses.

Kewajiban pemerintah adalah melaksanakan kewajiban negara yang meliputi melindungi (*to protect the people*), melayani (*to serve the people*), dan mengatur (*to regulate the people*) yang pada dasarnya adalah “pemberi pelayanan” pemenuhan kepentingan publik (*public interest*) dan mengatasi masalah-masalah publik (*public affairs*).

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu pemerintahan dalam melaksanakan *Good Governace*, yakni : pemerintah (*state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai menurut teori segitiga besi yakni apabila ada penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang sinerjik dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 223.
- Dunn, N. William, 1998. *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2001. *Reformasi Birokeasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta.
- Faisal, Sanipah, 1995. *Format dan Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke-4.
- Gie, The Tiang. 1976. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung : Refika Aditama. Cetakan Pertama.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Moenir,H.A.S.2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nainggolan,H.1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : FEUI.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. Edisi III, hal. 897.
- Safitri, Fitriani, 2011. *Penerapan Good Governance dalam Kegiatan Pembangunan Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* : Proposal Penelitian.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama. Cetakan Pertama.
- Sianipar,JPG. 2000. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Surjadi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : Refika Aditama. Cetakan Kesatu.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya, Insani Cendekiawan.
- Zauhar, Soesilo. 1994. *Kualitas Pelayanan Publik Suatu Paparan Teoritik : Majalah Administrator*. Edisi 2/XX/1994. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi

Dokumen-dokumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KIPRAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN SINJAI PASCA KEKALAHAN PADA PEMILU 2009

Oleh:
Muhammad Lutfi
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009. Kiprah partai politik didasarkan pada upaya partai untuk membentuk opini dan wacana publik dalam rangka mencitrakan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang mengalami penurunan suara yang signifikan dalam pemilihan umum Tahun 2009, dibutuhkan upaya partai untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya pencitraan partai politik adalah dengan mengenalkan simbol-simbol partai secara kelembagaan di masyarakat. Pengenalan simbol-simbol ini dapat melalui kiprah partai dalam politik di tingkat lokal serta kiprahnya di dalam masyarakat. Sehingga dengan itu, akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keberadaan partai tersebut. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut tidak hanya sebatas pada figur-figur tertentu di dalam partai, tetapi masyarakat memahami partai tersebut berdasarkan ideologi, program dan visi misi partai secara kelembagaan.

Kata Kunci: pelembagaan partai, Partai Golkar, *reification*

PENDAHULUAN

Partai politik dalam sistem pemerintahan demokratis berfungsi sebagai representasi dari kepentingan warga negara melalui anggotanya yang duduk dalam lembaga legislatif yang dipilih lewat pemilihan umum (pemilu). Partai politik juga berperan penting dalam proses penentuan kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sementara itu, pada level daerah dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah, partai politik menjadi wadah untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung dalam Pemilu. Dengan tugas dan fungsinya tersebut, partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya, melalui pembenahan secara internal maupun eksternal.

Dengan tugas dan fungsi demikian, partai politik selayaknya dibangun dengan penataan yang baik dari sisi kelembagaan. Namun demikian, keberadaan partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam tatanan negara demokratis sampai saat ini masih menyisakan berbagai problem. Partai politik di Indonesia yang sejatinya menjadi pionir dalam mewujudkan tatanan demokrasi pasca reformasi, dalam kenyataannya hanya berorientasi untuk mencari kedudukan dan kekuasaan. Seperti yang digambarkan oleh Sutoro Eko (2006, hh. 16-18) yang mengungkapkan bahwa partai politik di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang membawa manfaat bagi kepentingan rakyat. Hal itu menurutnya setidaknya disebabkan oleh 5 (lima) hal, yakni : *pertama*, perjalanan partai politik diwarnai oleh “patahan-patahan sejarah” partai. Di tengah-tengah patahan itulah partai-partai tumbuh dan menghilang silih berganti. *Kedua*, terbentuknya jurang yang lebar antara partai politik dengan masyarakat akibat warisan kebijakan massa mengambang dan praktek korporatisme orde baru. *Ketiga*, partai politik di Indonesia lebih kental dengan personalitas para elitnya (personalisme) ketimbang sebagai organisasi yang mengakar ke bawah. *Keempat*, partai politik lebih digerakkan oleh politik identitas yang sektarian

ketimbang oleh ideologi dan perjuangan kelas. Dan *kelima*, keptaiaan di Indonesia jauh dari budaya oposisi.

Partai politik juga cenderung tidak berusaha untuk menjadi penentu jalannya pemerintahan, tetapi terkadang hanya menjadi “penonton” dari proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif). Padahal dari sisi kelembagaan, partai politik harus punya kompetensi dalam proses pembuatan kebijakan. Se jauh ini, fungsi partai politik hanya diwacanakan sebagai institusi perwakilan rakyat, bukan sebagai institusi pembuatan kebijakan (Santoso 2006, h. 36). Sehingga keberadaan partai dalam proses perumusan kebijakan hanya diserahkan kepada segolongan orang-orang partai yang ada di lembaga perwakilan. Akibatnya, para aktivis partai merasa bahwa misi partai politik telah selesai ketika telah berhasil mendudukkan wakilnya di legislatif.

Hal inilah kemudian yang membuat kepercayaan publik terhadap partai politik maupun figur-figur yang ada di dalamnya menjadi melemah. Ini akan berdampak pada menurunnya simpati dan kepercayaan publik kepada partai politik, yang berimbas pada dukungan publik terhadap partai pada pelaksanaan pemilu. Padahal dengan sistem politik saat ini, banyaknya partai politik yang berkompetisi membuat persaingan antar partai semakin kompetitif. Sementara sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka, membuat persaingan tidak hanya antar partai, namun juga antar kandidat dalam internal partai. Dengan kondisi ini, pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting, baik dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, maupun untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik.

Konsep pelembagaan partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya seperti yang diuraikan oleh Randall & Svasand (2002) menekankan pada 4 (empat) dimensi, yaitu (1) dimensi kesisteman (*systemness*) yakni proses di mana pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) terkait dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya, (3) derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat), dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) yang merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat.

Penelitian ini kemudian difokuskan untuk meneliti pelembagaan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Sinjai pada dimensi pengetahuan publik (*reification*) yang bermakna bahwa keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Dalam hal ini terkait dengan imajinasi publik terhadap keberadaan partai yang didasarkan atas fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Keberadaan partai politik akan senantiasa tertanam dalam imajinasi publik ketika partai mampu meyakinkan publik melalui kegiatan nyata yang selalu selaras dengan visi dan platform partai tersebut. Begitu pula sejauhmana partai tersebut secara terus menerus memperkenalkan simbol-simbol partainya kepada publik melalui berbagai kegiatan ataupun cara-cara tertentu yang dapat meyakinkan publik akan keberadaan partai tersebut.

Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dijadikan sebagai objek kajian mengacu pada beberapa alasan. *Pertama*, Partai Golkar merupakan partai tua yang menurut beberapa penelitian sebelumnya memiliki tingkat pelembagaan yang cukup mapan di level nasional. Sehingga dalam penelitian ini ingin mengukur pelembagaan Partai Golkar di level lokal, yakni di Kabupaten Sinjai. *Kedua*, Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pada 2 (dua) kali Pemilu legislatif pasca orde baru (Pemilu 1999 dan 2004) masih menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD. Namun sejak itu pula Partai Golkar justru mengusung calon Bupati dari luar partai. *Ketiga*, pada Pemilu Legislatif 2009 justru mengalami penurunan suara yang signifikan yang dibarengi dengan kekalahan dalam perolehan kursi di legislatif daerah (DPRD Sinjai).

Momentum kekalahan dan penurunan dalam perolehan kursi yang dialami oleh Partai Golkar Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2009 inilah yang kemudian menjadi unit analisis dalam studi ini. Dalam artian bahwa studi ini lebih memfokuskan untuk mengkaji upaya Partai Golkar Kabupaten Sinjai melakukan pelembagaan partai pasca kekalahannya pada Pemilu 2009 melalui upaya partai berkiprah dalam politik lokal dan di tengah-tengah

masyarakat untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik.

Beberapa tulisan sebelumnya tentang Partai Golkar pasca reformasi telah dilakukan oleh Akbar Tanjung (2006), Suryadinata (2007), Syafarani (2008), dan Tomsa (2007). Di mana dari hasil penelitian tersebut mereka mengungkapkan bahwa pada tataran nasional pelembagaan Partai Golkar merupakan salah satu partai yang cukup mapan. Hal tersebut ditandai dengan tetap *survivenya* (*meminjam istilah Akbar Tanjung*), Partai Golkar di tengah kecaman dan kritikan yang dialamatkan kepadanya pasca runtuhnya orde baru. Sehingga secara teoritis diharapkan tulisan ini akan melihat dan menggambarkan pelembagaan Partai Golkar di tingkat lokal. Walaupun tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menyajikan pengukuran pelembagaan partai politik di tingkat lokal berlaku umum di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya secara praktis akan berusaha mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam pelembagaan partainya. Mengingat bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu, Partai Golkar di Kabupaten Sinjai senantiasa menjadi partai peraih kursi terbanyak di parlemen daerah. Begitu pula, pada Pilkada 2008, partai ini merupakan pengusung Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun pada Pemilu 2009 justru mengalami “degradasi” perolehan kursi dan suara yang sangat signifikan.

Bertitik tolak dari kajian sebelumnya yang diuraikan di atas, maka studi ini dilakukan berbeda. Studi yang dilakukan ini difokuskan pada pelembagaan Partai Golkar di daerah dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sinjai. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini mengungkap pelembagaan partai Partai Golkar di level lokal ditinjau dari salah satu dimensi pelembagaan partai politik yakni dimensi pengetahuan publik (*reification*). Meskipun nantinya tidak bermaksud untuk mengukur hasil penelitian ini berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat pasca kekalahan pada Pemilu 2009?

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat pasca kekalahan pada Pemilu 2009.
2. Untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat pasca kekalahan pada Pemilu 2009.

KERANGKA TEORI

Partai Politik

Kehadiran partai politik dalam suatu negara yang demokratis merupakan suatu keharusan, karena keberadaannya merupakan salah satu instrumen utama demokrasi. Partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi politik masyarakat serta akan diharapkan menjadi pengendali pemerintah dalam mengelola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Ramlan Surbakti (2010, h. 144) mengemukakan bahwa asal usul partai politik berasal dari tiga teori yaitu : Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Menurutnya, ciri-ciri partai politik adalah berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta turut dalam pemilihan umum.

Definisi tentang partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Sigmund Neumann (dikutip dalam Miriam Budiarto 2007, h. 404) mengemukakan bahwa “Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Dalam pengertian ini, nampaknya Neumann menekankan pentingnya penanaman ideologi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan politik untuk mendapatkan dukungan. Karena dalam usaha meraih kekuasaan politik, golongan lain yang memiliki ideologi berbeda juga akan melakukan hal yang sama.

Sementara itu, Sartori (dikutip dalam Miriam Budiarto 2007, h. 404) lebih menekankan pada aspek penempatan calon-calon dari partai politik dalam menduduki jabatan publik. Jabatan publik tersebut didapatkan dengan cara-cara yang konstitusional yakni melalui pemilihan umum. “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office*)”.

Secara umum, Riswandha Imawan mengemukakan bahwa pada dasarnya definisi-definisi mengenai partai politik memiliki kesamaan ciri, yakni : *pertama*, kumpulan orang-orang se ide dan berupaya mewujudkan ide-ide tersebut. *Kedua*, memiliki organisasi yang rapi, yang memiliki kontinuitas kegiatan sepanjang tahun. *Ketiga*, berupaya menyusun agenda kebijakan, serta berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan atas agenda tersebut. *Keempat*, berambisi menempatkan wakil-wakilnya dalam jajaran pemerintahan untuk mewujudkan ide-idenya (dikutip dalam Ratnawati 2006, h. 2)

Berdasarkan beberapa pengertian partai politik di atas, partai politik pada hakekatnya mempunyai kemampuan penetrasi (penguasaan jabatan publik) tidak hanya dalam konteks orientasi jabatan publik atau yang kemudian disebut *office*, melainkan juga dalam orientasi *to drive public policy*. Untuk itu, secara umum fungsi partai politik adalah representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin,

pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah (Macridis 1996, h. 26).

Pelebagaan Partai Politik

Pelebagaan partai politik merupakan tahap akhir dari pembangunan sebuah partai politik. Konsep ini mensyaratkan pondasi-pondasi yang sebelumnya ada, dan mensyaratkan pembangunan secara bertahap. Huntington (2003, hh. 489-497) menguraikan bahwa proses pembangunan partai biasanya berkembang melalui empat tahapan penting: Pertama, faksionalisme (pengelompokan). Tahap ini ditandai dengan partisipasi dan pelembagaan politik yang masih rendah. Politik melibatkan sejumlah kecil orang yang bersaing satu sama lain dengan struktur dan daya tahan yang lemah. Kedua, polarisasi (pemisahan). Polarisasi terjadi karena dorongan perluasan basis peran serta politik serta memantapkan hubungan antar faksi-faksi politik dengan peningkatan kekuatan-kekuatan sosial. Ketiga, ekspansi (perluasan). Partai politik yang kuat akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat, mengikat, serta mempersatukan mereka melalui organisasi yang efektif. Dan cara yang bisa dilakukan ialah dengan menggusur sistem yang berlaku, mengendalikan sistem tersebut, ataupun menerobos masuk ke dalamnya. Keempat, ialah institusionalisasi (pelebagaan).

Selanjutnya Huntington (2003, hh. 16-28) mengemukakan bahwa pelebagaan adalah proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabilitas (*Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability*). Menurutnya, ada 4 (empat) aspek utama yang menjadi ciri partai yang telah terlembaga, yaitu **pertama**, *adaptability*; dimaknai bahwa semakin mudah suatu organisasi atau tata cara menyesuaikan diri, semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. Hal ini dapat diukur melalui perhitungan kronologis, usia generasi serta segi fungsi. *Kedua*, kompleksitas; diartikan bahwa semakin kompleks suatu organisasi, akan semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. *Ketiga* otonomi; otonomi lembaga politik diukur dari tingkat sejauhmana lembaga itu memiliki kepentingan dan nilai-nilai lembaga serta kekuatan sosial lainnya. *Keempat*, keterpaduan; dimaknai bahwa semakin terpadu dan utuh suatu organisasi, semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya; dan sebaliknya semakin terpecah-pecah organisasi, semakin rendah pula tingkat pelebagaannya.

Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Mainwaring dan Torcal bahwa ada 3 (tiga) kerangka isu utama dalam melakukan institusionalisasi partai, yakni *electoral volatility*, *ideological voting*, dan *personalism* (S2 PLOD UGM, 2008).

Tabel 1. Kerangka Isu Institusionalisasi Partai

Isu	Penjelasan
<i>Electoral volatility</i>	Institusionalisasi dipahami sebagai gerak yang stabil dari perolehan suara partai. Ini ditandai dengan tingginya “kesetiaan” (rendahnya tingkat perpindahan suara) dari masyarakat dalam memberikan suaranya

	kepada partai yang sama (atau partai yang secara program atau ideologi berdekatan). Penanda lainnya juga bisa dilihat dari rendahnya tingkat penyeberangan elit-elit politik dari satu partai ke partai lainnya.
<i>Ideological voting</i>	Institusionalisasi dipahami sebagai gerak yang stabil atau konsisten dari program dan ideologi partai. Jika pun terjadi pergeseran, maka ini berjalan dalam proses yang transisional dan tidak terlalu jauh dari yang diusung sebelumnya. Ideologi dapat diukur melalui program dan perilaku politik dari partai dalam merespon setiap situasi. Selain itu, institusionalisasi dimaksudkan untuk mendorong rasionalitas preferensi politik masyarakat untuk memberikan suaranya atas dasar pertimbangan program partai.
<i>Personalism</i>	Institusionalisasi dipahami sebagai menguatnya organisasi partai terhadap kecenderungan munculnya personalisme dalam partai. Personalisme akan menyebabkan partai tergantung pada sosok atau kharisma individual (khususnya pemimpin partai). Oleh karena itu, agenda institusionalisasi partai harus disertai dengan upaya depersonalisasi.

Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda, selanjutnya Vicky Randall dan Lars Svasand (2002, h. 12) kemudian merumuskan bahwa “pelebagaan partai politik dipahami sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*process by which the party becomes established in terms both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture*)”.

Lebih lanjut keduanya mengelompokkan pelebagaan partai menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu sebagai berikut :

Dimensi Kerpertaian	Internal	Eksternal
Structural (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional autonomy</i> (Otonomi Keputusan)
Attitudinal (Kultural)	<i>Value infusion</i> (Identitas Nilai)	<i>Reification</i> (Citra pada Publik)

Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek

internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Dimensi pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian ini, yang difokuskan pada dimensi pengetahuan publik (*reification*). Alasannya didasarkan bahwa konsep pelebagaan yang diuraikan oleh mereka merupakan hasil perpaduan dari konsep pelebagaan partai yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, dalam konsepsi ini mencakup pelebagaan internal dan eksternal partai politik. Konsepsi mengenai pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand ini kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh Surbakti (2003).

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (*platform*) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu.

Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai itu. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah pengetahuan publik tentang sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai atau platform partai yang secara formal dikemukakan pada masyarakat umum? Tampaknya, pengetahuan publik tentang partai politik di Indonesia umumnya berbeda dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan lokus penelitian adalah Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga data-

data hasil penelitian ini dibatasi oleh waktu antara tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisa deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2010, h. 6).

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan karena topik pembahasan penelitian mengenai pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai. Data yang diperoleh melalui dokumen adalah data-data dan dokumentasi yang terkait kegiatan-kegiatan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai, serta notulen-notulen rapat maupun hasil-hasil keputusan Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian.

2. Wawancara

Dalam rangka mencapai informasi yang spesifik dan mendalam, untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus sebagai bentuk konfirmasi atas dokumen-dokumen yang didapatkan melalui dokumentasi, maka wawancara dalam penelitian ini mutlak dilakukan. Wawancara dilakukan secara terfokus, guna efisiensi dan efektivitas waktu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara telah dilakukan dengan:

- a. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai.
- b. Unsur Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
- c. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
- d. Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2009-2014 yang berasal dari Partai Golkar.
- e. Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pengembangan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai. Selain itu, menggali informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang dianggap pernah memiliki hubungan kuat dengan partai, namun saat ini bergabung dan mengarahkan dukungannya dengan partai lain.

3. Observasi langsung

Observasi langsung dilakukan dengan tujuan melihat dinamika Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 dalam upaya pelebagaan partai. Dalam penelitian ini juga melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan partai secara internal maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Untuk analisis terhadap data yang telah diperoleh, dilakukan dengan mendasarkan kepada asumsi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, dengan melalui tahapan dalam bentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam hal ini proses kegiatan analisis data meliputi a) tahap pengumpulan data, b) mereduksi data untuk mendapatkan pokok-pokok tema yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah penelitian, c) penilaian data, yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data primer dan

data sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, d) menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi, data yang telah diperoleh, diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Sehingga data yang diperoleh bisa menjadi suatu kesimpulan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus tentang pelebagaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009. Hal ini tentunya dibatasi oleh tempat dan waktu, di mana data-data yang nantinya disampaikan hanya pada rentang waktu antara tahun 2009-2011. Sehingga hasil temuan dan kesimpulan yang diperoleh tidak bisa dijadikan acuan untuk menggambarkan kondisi Partai Golkar Kabupaten Sinjai sebelum dan setelah rentang waktu tersebut. Demikian pula, hasil penelitian ini tidak menggambarkan kondisi Partai Golkar secara umum di seluruh Indonesia. Begitu pula dalam menganalisis kasus ini, landasan teori yang dijadikan acuan oleh penulis telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang derajat pengetahuan publik terkait dengan keberadaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini terkait dengan imajinasi publik terhadap keberadaan partai yang didasarkan atas fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Keberadaan partai politik akan senantiasa tertanam dalam imajinasi publik ketika partai mampu meyakinkan publik melalui kegiatan nyata yang selalu selaras dengan visi dan platform partai tersebut. Begitu pula sejauhmana partai tersebut secara terus menerus memperkenalkan simbol-simbol partainya kepada publik melalui berbagai kegiatan ataupun cara-cara tertentu yang dapat meyakinkan publik akan keberadaan partai tersebut.

Konsep *reification* pada prinsipnya adalah upaya partai untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Secara konseptual, partai politik yang mampu mencitrakan dirinya dengan baik di mata publik, akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Sebaliknya, jika di mata publik partai tersebut memiliki citra yang tidak diinginkan oleh publik, maka kecenderungan untuk ditinggalkan oleh publik juga akan tinggi. Pada kenyataannya saat ini kita dapat menyaksikan bagaimana partai-partai politik yang ada, terus berupaya untuk tampil sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Upaya pencitraan yang dilakukan oleh partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di masyarakat.

Olehnya itu, untuk dapat mengidentifikasi pengetahuan publik tentang Partai Golkar Kabupaten Sinjai maka akan dilihat mengenai kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam politik lokal berupa keterlibatan partai dalam proses perumusan kebijakan di legislatif dan eksekutif serta dalam konteks keterlibatan dalam pilkada. Melalui aktivitas politik yang dilakukan oleh Partai Golkar

Kabupaten Sinjai akan tercermin bagaimana partai ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya juga akan dilihat sejauhmana kiprah partai di masyarakat berupa penggunaan simbol-simbol partai secara kelembagaan maupun personal partai dalam upaya mengenalkan partainya di masyarakat.

Kiprah Partai dalam Politik Lokal

Partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sarana perwakilan masyarakat, mempunyai fungsi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Di samping untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, aktifitas partai dalam politik juga diwujudkan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari publik. Karena dengan perjuangan yang didasarkan atas kepentingan masyarakat, akan menanamkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan partai tersebut. Dalam konteks ini, partai tentunya menyerahkan tugas ini kepada kader-kader mereka yang memiliki sumberdaya kekuasaan, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif.

Namun perlu dipahami bahwa, tugas dan wewenang untuk menyuarkan kepentingan masyarakat tidak mesti dilakukan secara individual oleh kader partai yang ada di legislatif. Partai secara kelembagaan seharusnya memiliki peran untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan di legislatif. Artinya bahwa peran untuk merumuskan kebijakan di legislatif tidak serta merta hanya diserahkan kepada kader yang duduk di legislatif, tetapi partai secara kelembagaan harus senantiasa ikut serta dalam proses tersebut. Meskipun pada akhirnya, tetap diserahkan kepada kader yang ada di legislatif, namun prosesnya semestinya melalui keputusan partai secara kolektif. Dengan demikian, akan tercermin bahwa apa yang dilakukan searah dengan ideologi dan platform partai serta kepentingan konstituen, tidak atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kiprah partai di legislatif dan eksekutif

Melalui pelaksanaan pemilu, baik pililukada maupun pemilu legislatif, suatu partai yang mendapatkan dukungan dari masyarakat akan dapat menempatkan kader-kadernya untuk memangku jabatan publik. Melalui Pililukada langsung partai diberikan peluang untuk menjadi wadah pengusung calon pemimpin daerah, dan lewat pemilu legislatif partai politik juga menjadi satu-satunya wadah untuk menempatkan kader-kadernya menjadi wakil rakyat. Pada kedua momentum inilah yang kemudian menjadi pertarungan bagi sebuah partai untuk menarik dukungan dari masyarakat. Akibat membutuhkan dukungan dari masyarakat inilah, maka partai politik akan senantiasa berupaya menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya dari partai untuk menanamkan kepercayaan dari masyarakat akan keberadaan partai tersebut.

Hal pertama yang dapat dilakukan oleh partai dalam upaya menanamkan kepercayaan dan pemahaman publik terhadap partai adalah melalui kiprah dalam kancah politik lokal. Sebagai wadah perwakilan masyarakat yang dipilih

melalui proses pemilu, anggota legislatif yang berasal dari partai politik harus mampu mengakomodir dan mengagregasikan kepentingan dari masyarakat yang telah memilihnya dalam pemilu. Partai politik secara kelembagaan diberikan kepercayaan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Salah satunya adalah melalui mekanisme perumusan kebijakan di legislatif, di mana segala kebijakan akan senantiasa dirumuskan bersama antara eksekutif dan legislatif. Pada titik inilah peran partai politik akan dinilai oleh publik, melalui keberpihakannya terhadap kepentingan yang diwakilinya.

Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang saat mendudukkan kadernya sebanyak 4 (empat) orang di DPRD Sinjai, memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya di legislatif. Sementara di eksekutif Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai saat ini menjabat sebagai wakil bupati. Dengan posisi ini, Partai Golkar Kabupaten Sinjai setidaknya memiliki cukup kekuatan untuk mengenalkan partainya di masyarakat melalui wadah ini. Partai Golkar Kabupaten Sinjai sendiri dengan 4 (empat) orang kadernya yang duduk di DPRD Kabupaten Sinjai membentuk fraksi sendiri tanpa melalui koalisi dengan partai lain. Di samping itu sebagai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2009, juga mendudukkan salah seorang kadernya pada posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD II Sinjai bahwa sebagai upaya partai dalam perumusan kebijakan, maka fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di legislatif. Sehingga dalam setiap perumusan kebijakan, fraksi akan senantiasa berkomunikasi dengan pengurus-pengurus partai mengenai sikap partai dalam sebuah perumusan kebijakan. “Jadi kami sebagai perpanjangan partai di legislatif, tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman di partai, apalagi jika ada kegiatan yang sifatnya membutuhkan masukan dari pengurus partai. Misalnya dalam pembahasan pertanggung jawaban pemerintah, hasil pertanggung jawaban tersebut kemudian kami konsultasikan dengan pengurus partai untuk selanjutnya menjadi pandangan umum fraksi” (*wawancara dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sinjai, tanggal 3 Oktober 2011*).

Dalam pandangan umum fraksi tersebut, menurutnya fraksi Partai Golkar akan senantiasa berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan visi dan misi partai. Apalagi dalam setiap rapat paripurna, senantiasa disiarkan secara langsung melalui media radio, sehingga seluruh masyarakat dapat menilai tentang posisi partai dalam merumuskan sebuah kebijakan. Sehingga melalui momentum ini Partai Golkar Kabupaten Sinjai akan berupaya mensinkronkan arah kebijakan partai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ir. A. Kartini yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, bahwa dengan keberadaan beberapa kader di legislatif dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka pada intinya adalah merupakan

perwakilan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan senantiasa berorientasi untuk kepentingan masyarakat yang telah mendukungnya. Meskipun secara organisasi, kader-kader yang ada di legislatif juga senantiasa bergerak sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Untuk mensinkronkan kepentingan publik dan kepentingan partai inilah, maka dalam setiap proses perumusan kebijakan senantiasa melibatkan pengurus dan kader-kader lainnya yang ada di DPD II sampai kepada pengurus di tingkat di desa.

Penjelasan yang disampaikan oleh narasumber di atas walaupun terkesan sifatnya sangat normatif, namun setidaknya ada upaya dari partai untuk mendengarkan aspirasi dari bawah. Meskipun hal ini juga akan sangat riskan ketika campur tangan partai secara kelembagaan bisa saja mempengaruhi proses yang terjadi di legislatif. Apalagi dipahami bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai merupakan partai pengusung utama bupati pada Pemilu 2008, sehingga sangat dimungkinkan akan senantiasa mendukung kebijakan penguasa. Meskipun hal ini ditampik oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh fraksi di legislatif selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Selain secara kelembagaan melalui fraksi di legislatif, hal lain yang dapat dilakukan oleh partai untuk membentuk citra adalah dengan melalui individu-individu dari anggotanya di legislatif. Karena mereka yang terpilih ini tentunya didasarkan atas dukungan yang kuat dari masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kecenderungan pemilih dengan sistem pemilu yang ada, lebih menekankan pada keberadaan figur di dalam partai. Figur-figur inilah yang dapat menjadi salah satu simbol partai untuk berperan aktif dalam menanamkan citra di masyarakat. Aktifitas yang dilakukan oleh wakil-wakil ini akan senantiasa beriringan antara kapasitasnya sebagai wakil masyarakat dan kepentingan partai politik yang mengusungnya.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh partai adalah melalui eksistensi partai di media publik khususnya bagi wakil-wakil partai yang di legislatif. Dalam artian bahwa semakin sering sosok pengurus memberikan statement yang di media dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat, maka tingkat pengetahuan publik tentang kiprah suatu partai juga akan meningkat. Sebagai contoh ketika ada keluhan-keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Partai Golkar Kabupaten Sinjai melalui wakilnya di legislatif setidaknya berupaya membangun citra di masyarakat melalui komentar atau statementnya di media massa, yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, berita-berita di media lokal yang memuat Partai Golkar Kabupaten Sinjai baik secara kelembagaan maupun personal partai sangat kurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Ketidakmampuan Partai Golkar Kabupaten Sinjai baik secara kelembagaan maupun individu dalam berupaya mengangkat citra partai melalui *statement* di media massa diamini oleh salah seorang mantan anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Menurutnya para anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Sinjai saat ini tidak

mampu menggunakan media sebagai ajang untuk memperkenalkan partai ke masyarakat.

Pola pendekatan melalui media dalam upaya mengangkat citra partai di mata publik dalam kondisi saat ini memang menjadi keharusan bagi partai. Pengembangan wacana dan opini publik di media massa saat ini merupakan bagian dari strategi partai untuk menanamkan eksistensinya di mata publik. Karena melalui medialah merupakan salah satu ajang bagi publik untuk mengetahui sejauhmana partai melakukan aktifitasnya dalam proses-proses perumusan kebijakan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ketidakmampuan Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam menggalang komunikasi dan bermitra dengan media ini jelas mempengaruhi citra partai tersebut di mata publik. Akibatnya adalah informasi mengenai proses kebijakan yang dilakukan oleh partai tidak diketahui oleh publik secara luas, dan tentunya ini mempengaruhi penilaian publik terhadap keberadaan partai tersebut.

Kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan Pilkada

Seiring dengan proses pemilihan kepala daerah (bupati) secara langsung, peran partai di daerah juga semakin besar. Partai politik yang diberikan kewenangan untuk mengusung pasangan kepala daerah, tentunya berupaya untuk mendudukkan kader partainya menjadi pemimpin di daerah. Namun demikian, partai politik juga tidak serta merta mengabaikan suara dan dukungan dari masyarakat. Karena melalui proses politik inilah, keberadaan partai akan diuji kredibilitasnya melalui arah dukungannya terhadap calon kepala daerah. Ketika partai mengabaikan suara dan dukungan mayoritas masyarakat di daerah, akan dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut memudar.

Dalam pemilihan kepala daerah langsung, Partai Golkar Kabupaten Sinjai senantiasa berupaya mengusung calon-calon yang dianggap memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan pilkada 2008, Partai Golkar Kabupaten Sinjai mengusung calon bupati yang bukan dari kadernya, karena adanya ketentuan konvensi. Walaupun calon yang diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai waktu itu berhasil memenangkan pemilukada, namun akibatnya berimbas ke partai. Imbas yang dimaksud adalah beberapa kader yang tidak sepakat dengan hal itu, memilih untuk keluar dari partai.

Partai Golkar Kabupaten Sinjai sebagai pengusung utama pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada 2008, memiliki peluang besar dalam mengendalikan jalannya pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada Pemilukada 2008, pasangan yang diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai menjadi pemenang dan menempatkan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai menjadi wakil bupati. Dengan posisi ini, seharusnya akan menguntungkan Partai Golkar Kabupaten Sinjai untuk dapat menjadi bagian dari partai yang berkuasa. Karena pada dasarnya partai pengusung sejatinya akan mendapatkan keuntungan lebih ketika kandidat yang diusungnya menjadi pemilu. Salah satunya adalah dapat mengangkat citra partai di mata

masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan di eksekutif.

Kemenangan pasangan yang diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2008 tidak berimbas pada meningkatnya popularitas dan citra partai di masyarakat. Terbukti bahwa pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, Partai Golkar Kabupaten Sinjai justru mengalami kemerosotan perolehan suara yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan dukungan Partai Golkar Kabupaten Sinjai terhadap paket Kepala Daerah tidak mampu membawa dampak terhadap peningkatan dukungan masyarakat terhadap partai. Dalam artian bahwa citra partai dengan kemenangan dalam pemilu tidak memberikan pengaruh positif kepada partai terkait dengan perolehan suara partai dalam pemilu legislatif.

Menurut salah seorang tokoh Partai Golkar Kabupaten Sinjai bahwa pengalaman yang dialami Partai Golkar Kabupaten Sinjai dengan mengusung kader di luar partai, ternyata berdampak pada kemunduran partai. Bupati yang menjabat saat ini, yang notebene diusung Partai Golkar Kabupaten Sinjai pada kenyataannya justru menjadi bumerang tersendiri bagi Partai Golkar Kabupaten Sinjai. Untuk itu pada pelaksanaan pilkada selanjutnya (Tahun 2013), Partai Golkar Kabupaten Sinjai bertekad untuk mengusung kadernya sendiri sebagai calon bupati. Apalagi untuk saat ini, mekanisme konvensi sudah tidak diberlakukan lagi sehingga membuka peluang besar bagi Partai Golkar Kabupaten Sinjai untuk mengusung kadernya sendiri.

Komitmen pengurus tersebut Partai Golkar Kabupaten Sinjai tentunya mesti dibarengi dengan kesiapan kader partai yang akan diusung. Karena jika merujuk pada pelaksanaan pilkada 2003, ternyata kader partai yang diusung justru tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini patut menjadi perhatian partai, agar dalam kiprahnya dalam pelaksanaan pilkada, tidak hanya sekedar mengusung kepentingan partai. Karena jika Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak selektif dalam hal ini, akan menjadi masalah tersendiri bagi partainya yang belakangan ini mengalami kemunduran yang cukup berarti.

Meskipun demikian beberapa narasumber, walaupun partai berupaya mengajukan kadernya dalam pilkada, tetapi jika calon tersebut tidak kompeten dan tidak mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat maka partai tidak akan memaksakannya. Karena basis yang dilakukan oleh partai dalam mengusung calon bupati adalah berdasarkan hasil survey, baik yang dilakukan oleh internal partai maupun oleh lembaga-lembaga independen. Dengan demikian, dalam hal ini Partai Golkar Kabupaten Sinjai cukup selektif dan tidak terpaksa pada upaya mengajukan kadernya. Bagi Partai Golkar Kabupaten Sinjai, sangat riskan mengusung calon yang tidak didukung oleh publik karena dapat berakibat menurunnya kepercayaan publik terhadap Partai Golkar itu sendiri.

Kiprah Partai di Masyarakat

Salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh partai untuk dapat menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya dengan melalui kiprah partai di

masyarakat. Kiprah partai di masyarakat adalah dengan melalui kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal kader partai. Kegiatan-kegiatan dimaksud dapat berupa pengenalan simbol-simbol partai kepada masyarakat mengenai keberadaan partai. Penggunaan simbol-simbol ini bertujuan untuk menanamkan ideologi dan platform partai, sehingga keberadaan partai tersebut dapat dipahami dan tertanam dalam imajinasi publik.

Upaya Partai Golkar Kabupaten Sinjai untuk mengenalkan eksistensinya lebih banyak dilakukan melalui kegiatan person-person yang ada dalam partai. Hal itupun terbatas pada kiprah dari masing-masing kader sesuai dengan posisi dan jabatan yang dimilikinya. Secara kelembagaan, terkesan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak banyak melakukan kegiatan yang arahnya untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap keberadaan partainya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cenderung sifatnya sekedar menarik dukungan publik, dan tidak berorientasi bagaimana publik memahami partai atas dasar ideologi dan platformnya. Pemahaman-pemahaman seperti itu terbatas ada kegiatan-kegiatan internal partai, yang juga hanya diikuti oleh kader-kader internalnya.

Sebagai bagian dari simbol partai, figur-figur yang ada dalam partai khususnya sebagai anggota legislatif, nampaknya belum menunjukkan adanya aktivitas yang dapat mempengaruhi sikap publik terkait dengan arah perjuangan partainya. Aktivitas yang dilakukan selama ini terkesan hanya sekedar menonjolkan individunya. Artinya bahwa figuritas mereka inilah yang kemudian dipahami oleh publik, tidak dalam kapasitasnya sebagai orang partai yang berjuang sesuai ideologi dan platform partai. Seperti diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Sinjai dari fraksi Partai Golkar Kabupaten Sinjai:

Jadi menurutnya bahwa aktivitas yang kadang dilakukan oleh person-person yang ada dalam partai adalah lebih mengedepankan keberadaan figur. Masyarakat pemilih umumnya mengidentifikasi partai menurut figur, tanpa didasarkan oleh pemahaman dan kesamaan ideologi atau platform partai. Sehingga jika ideologi atau platform yang ditanamkan ke masyarakat, tidak akan mudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini berarti memang bahwa citra partai yang dibangun selama ini di masyarakat lebih mengarah pada simbol figur yang ada dalam partai dibandingkan dengan pemahaman ideologi atau platform partai.

Hal demikian pula terlihat dari program dan kegiatan-kegiatan Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang dilakukan selama ini. Dari dokumen kegiatan partai yang berhasil penulis dapatkan, kegiatan partai lebih banyak dihabiskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internal. Misalnya menghadiri pertemuan di DPP atau DPD I, acara pelantikan pengurus, maupun pelatihan-pelatihan di internal partai. Penulis tidak mendapatkan dokumen ataupun pengamatan langsung berupa kegiatan partai di masyarakat yang wujudnya dapat menarik simpati publik dan mengenalkan keberadaan partainya di masyarakat.

Partai Golkar Kabupaten Sinjai terkesan tidak mampu memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melancarkan kiprahnya di masyarakat. Partai hanya

disibukkan oleh kegiatan yang sifatnya administratif, tanpa adanya upaya untuk mengenalkan simbol-simbol partai di masyarakat secara konsekuen. Seperti pada momen bulan ramadhan tahun lalu, tidak terlihat adanya kegiatan partai yang melakukan safari ramadhan, ataupun pada perayaan hari-hari besar keagamaan ataupun nasional, Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak berupaya memanfaatkan momen itu untuk melakukan kegiatan di masyarakat.

Sangat jarang terlihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan pengenalan simbol partai di masyarakat. Kalaupun ada, hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal. Seperti pada saat penelitian dilakukan, Partai Golkar Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan internal partai. Sehingga menurut penulis, kegiatan semacam ini tidak kemudian menguntungkan partai dari sisi pencitraan di mata publik.

Akibatnya, walaupun Partai Golkar merupakan partai lama, namun pada kenyataannya pemahaman masyarakat tentang partai tersebut hanya terbatas pada keberadaan orang-orang (pengurus) yang ada dalam partai. Menurut salah seorang pengurus yang juga anggota DPRD Sinjai dari fraksi Partai Golkar, sangat sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ideologi partai. Mengingat sikap masyarakat yang cenderung melihat dan memahami partai tidak didasarkan pada ideologi, tetapi sosok dari pengurus yang ada di dalam partai. Sehingga ketika misalnya dalam proses kampanye menjelang pemilu, diakuinya pengenalan ideologi, visi misi, dan platform partai hanya sekitar 10%, sementara yang diutamakan adalah bagaimana para kontestan membawa misi pribadinya dalam upaya merebut hati masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai tidak dalam kapasitas memahami dalam kerangka ideologi dan platform partai, tetapi lebih kepada personal-personal yang ada dalam partai. Ini disebabkan kurangnya kegiatan-kegiatan partai yang sifatnya memperjuangkan kepentingan publik yang sesuai dengan arah platform dan program Partai Golkar kurang dilakukan.

Sementara pengakuan salah seorang pengurus Partai Golkar Kabupaten Sinjai bahwa kendala yang dihadapi oleh partai dalam upayanya mengenalkan simbol-simbol partai di masyarakat karena kekuasaan tidak lagi dominan dikendalikan oleh Partai Golkar.

Kendala yang diungkapkan oleh responden di atas, tidak memiliki dasar yang jelas dan ironi dengan kondisi yang ada. Pencitraan partai melalui pengenalan simbol-simbol partai tidak mesti melalui jalur kekuasaan. Kalaupun hal tersebut yang harus dilakukan, Partai Golkar Kabupaten Sinjai setidaknya memiliki kapasitas untuk melakukannya. Karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai merupakan pengusung paket Kepala Daerah, dan mendudukkan ketuanya sebagai wakil bupati. Namun posisi yang strategis ini memang terlihat tidak dimanfaatkan oleh partai untuk menanamkan keyakinan kepada masyarakat akan eksistensi partai di tingkat lokal.

Kurang berfungsinya organisasi-organisasi internal Partai Golkar Kabupaten Sinjai juga setidaknya menjadi kendala partai dalam mengenalkan keberadaan partai di masyarakat. Sebagaimana penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa Partai Golkar sebenarnya memiliki kekuatan pendukung melalui organisasi internalnya, baik organisasi sayap maupun ormas pendiri dan ormas yang didirikan oleh partai. Namun karena keberadaan organisasi ini tidak maksimal, sehingga tidak cukup untuk dapat memberikan dampak yang besar terhadap partai dalam kaitannya dengan penanaman nilai-nilai partai di masyarakat.

KESIMPULAN

Penjelasan yang telah diuraikan dalam bab ini menunjukkan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai belum mampu dipahami oleh publik dengan baik secara kelembagaan. Aktivitas yang dilakukan partai baik di lembaga legislatif maupun eksekutif serta kiprahnya di masyarakat belum menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang dapat diidentifikasi dengan baik oleh publik. Kurangnya kegiatan partai dengan menggunakan simbol-simbol partai berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan keberadaan partai.

Kegiatan-kegiatan partai yang dilakukan lebih banyak dilakukan dengan menonjolkan figuritas tokoh yang ada di dalam partai. Meskipun hal tersebut bukan berarti suatu hal yang keliru, jika eksistensi figur tersebut mampu mewakili kepentingan partainya. Namun jika melihat hasil temuan menunjukkan bahwa figur-figur tersebut lebih mengedepankan program-program pribadi daripada program yang diusung oleh partai. Sehingga identifikasi masyarakat pun lebih mengarah kepada identifikasi figur-figur yang ada di dalam partai, dibanding keberadaan partai secara kelembagaan.

Meskipun harus diakui pula bahwa kecenderungan mengedepankan figur bagi partai saat ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu yang ada. Di mana dengan sistem pemilu yang ada tersebut, memaksa mereka yang ada di dalam partai bersaing memperebutkan simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Namun bagi penulis, sistem pemilu yang demikian bukan menjadi alasan yang kuat untuk tidak memperjuangkan kepentingan partai secara keseluruhan. Artinya bahwa berjuang untuk mendapatkan dukungan secara pribadi bukan berarti meninggalkan kepentingan partai, tetapi bagaimana meraih dukungan dari masyarakat yang berdampak bagi pengembangan partai ke depannya. Karena jika itu yang terjadi, maka kecenderungan kader-kader partai terkesan hanya menginginkan kekuasaan dan mengabaikan perjuangan partai.

Akhirnya, argumen yang dapat dibangun dari temuan-temuan di atas adalah bahwa untuk dapat membangun citra partai di masyarakat, partai politik harus senantiasa melakukan aktifitas kepartaian yang sejalan dengan arah perjuangan partai. Baik melalui kegiatan rutin partai di ranah legislatif dan eksekutif maupun di masyarakat. Dengan demikian keberadaan partai tersebut tidak hanya harus hadir di masyarakat ketika moment

pemilu atau pemilukada. Namun dengan kegiatan yang terus menerus dilakukan akan dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi partai tersebut.

Konsep perjuangan partai melalui ideologi partai, yang dituangkan lewat program dan platformnya harus dibarengi dengan aksi nyata yang dapat meyakinkan masyarakat. Dan itu dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman kepada publik akan arah perjuangan partai, bukan identifikasi partai yang didasarkan pada dominasi figur tertentu. Karena yang dapat mengenalkan arah perjuangan partai di masyarakat adalah kader-kader yang ada di partai. Sehingga figur-figur partai yang memiliki dukungan kuat di masyarakat, selayaknya lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadinya. Dengan demikian keberadaan partai politik akan senantiasa tertanam dalam imajinasi publik secara terus menerus, yang akan dapat berpengaruh terhadap keputusan publik dalam mengidentifikasi suatu partai. Partai politik yang tidak mampu mencitrakan dirinya dengan baik di masyarakat, cenderung akan ditinggalkan oleh masyarakat ketika partai membutuhkan dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi (Cetakan Ketiga). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwipayana, Ari. 2009. "Demokrasi Biaya Tinggi Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru", dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik UGM*, Volume 12, Nomor 3, Maret 2009, hh. 257-280.
- Eko, Sutoro. 2006. "Krisis Demokrasi Elektoral", dalam Pradjarta Dirjosanjata dan Nico L Kana (eds.). *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Hutington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Masa*. Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Imawan, Riswandha. 2004. *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jari Diri*. Yogyakarta. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada FISIPOL UGM.
- Lay, Cornelis, dkk. 2006. "Organisasi dan Manajemen Kepartaian", dalam *Parpol, Pemilu dan Parlemen: Agenda-Agenda Penguatan Parpol*. Yogyakarta: PLOD UGM & JPP UGM.
- Macridis, Roy C. 1996. "Pengantar, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai", dalam Dr. Ichlasul Amal (eds.). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mainwaring, Scott, & Mariano Torcal. 2006. "Party System Institutionalization And Party System Theory After The Third Wave of Democratization", dalam Katz, Richard. S dan William Crotty (eds.). *Hand Book of Party Politics*. London: SAGE.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh delapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD). 2006. *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Den Haag: The Netherlands Institute for Multiparty Democracy.
- Randall, Vicky, dan Lars Svasand. 2002. "Party Institutionalization in New Democracies", dalam *Jurnal Party Politics*, Vol.8 No.1, pp. 5-29. London: Sage Publication.
- Ratnawati. 2006. *Sistem Kepartaian di Era Transisi*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Rifai, Anam, dkk (Tim Penyusun). 2010. *Partai Politik, Demokrasi dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Romli, Lili, dkk (Eds.). 2008. *Pelebagaian Partai Politik Pasca Orde Baru (Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS)*. Jakarta: LIPI Press.
- S2 PLOD UGM Angkatan XVI. *Bahan Bacaan Utama Mata Kuliah Partai Politik, Pemilu dan Legislasi Daerah*. Yogyakarta: S2 PLOD Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, Purwo. 2006. "Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik: Kasus Kota Yogyakarta", dalam Pradjarta Dirjosanjata dan Nico L Kana (eds.). *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Surbakti, Ramlan. 2003. "Perkembangan Partai Politik di Indonesia", dalam Henk. S Nordholt & G. Anan (eds.). *Indonesia in Transition Work in Progress*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suryadinata, Leo. 2007. *The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto*. Contemporary Southeast Asia Vol. 29, No. 2, pp. 333-358.
- Syafarani, Tri Rainny. 2008. "Pelebagaian Partai Golongan Karya: Beringin yang Semakin Meranggas, dalam Lili Romli (Eds.). *Pelebagaian Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS*. Jakarta: LIPI Press.
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tomsa, Dirk. 2008. *Party Politics and Democracization in Indonesia; Golkar in the post-Soeharto era*. New York: Routlage 270 Madison Ave.

Dokumen :

- Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golongan Karya
- Kumpulan Peraturan Organisasi (PO), Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Keputusan DPP Partai Golkar 2009-2015.
- Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kaderisasi Partai Golkar Tahun 2011.
- Hasil-Hasil Rapat Kerja Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Laporan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah VIII DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai Tahun 2010.

